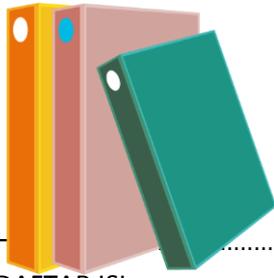


# LKjIP 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



# DAFTAR ISI

F	.....	i
	DAFTAR ISI .....	ii
	IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas.....	1
	1. Pembentukan.....	1
	2. Tugas dan Fungsi.....	3
	B. Sumber Daya Manusia .....	4
	C. Isu Strategis.....	5
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
	A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2018 .....	7
<b>III.</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	9
	A. Pencapaian Kinerja Organisasi.....	9
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018.....	9
	B. Realisasi Anggaran 2018 .....	15
	1. Capaian Perjanjian Kinerja 2018 (Pengukuran Kinerja 2018) .....	15
	2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja IKU Tahun 2018.....	17
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	18
	LAMPIRAN (PK DINPERKIM 2018) .....	iv

## ----- IKHTISAR EKSEKUTIF -----

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas*, maka *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- c) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- g) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- h) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* adalah **"TERWUJUDNYA PERUMAHAN PERMUKIMAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIANYA INFORMASI TATA RUANG YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL"**

Hakekat visi diwujudkan dengan 12 (dua belas) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
8. Program Penyediaan Fasilitas Umum;
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
10. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
11. Program Pemanfaatan Ruang;
12. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Pencapaian *realisasi kegiatan* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2018 adalah sebesar **100,00%** sedangkan *realisasi keuangan (96,42%)*. *Sisa keuangan* sebesar **Rp 2.746.442.592,00 (3,58%)** dari *total pagu anggaran Rp 73.946.557.408,00* telah dikembalikan ke kas daerah/tetap di kas daerah.

Purwokerto, Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JUNADI, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661213 199303 1 005



# BAB 1

## PENDAHULUAN

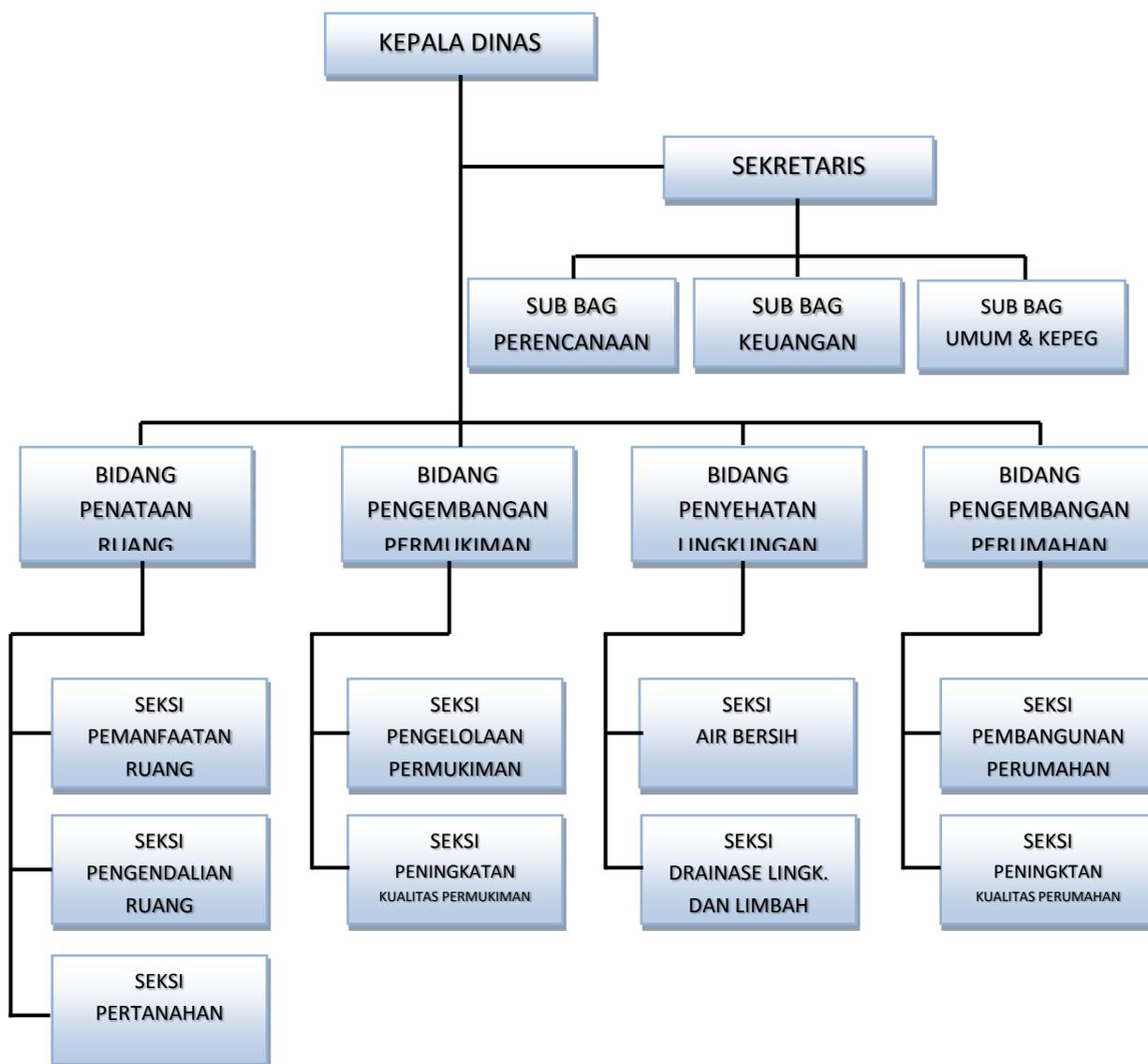
### A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas

#### 1. Pembentukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penataan Ruang**, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - b. Seksi Pengendalian Ruang
  - c. Seksi Pertanahan
4. **Bidang Pengembangan Permukiman**, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. **Bidang Penyehatan Lingkungan**, terdiri dari :
  - a. Seksi Air Bersih
  - b. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah
6. **Bidang Pengembangan Perumahan**, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Perumahan
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS :



## 2. Tugas dan Fungsi

### a. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### b. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 3) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 6) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 7) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 8) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut :

1. *Keadaan aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.*

SEKRETARIAT / BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
Kepala Dinas	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	13	5	1	19
Bid. Penataan Ruang	-	5	5	1	11
Bid. Pengembangan Permukiman	-	4	5	-	9
Bid. Penyehatan Lingkungan	-	5	4	1	10
Bid. Pengembangan Perumahan	-	3	4	1	8
<b>JUMLAH</b>	-	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>58</b>

2. *Keadaan personil menurut eselon*

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 orang
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	4 orang
Eselon IV A	12 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>18 ORANG</b>

3. *Keadaan personil menurut pendidikan formal*

PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan setingkat S2	3 orang
Pendidikan setingkat S1/D4	19 orang
Pendidikan setingkat D3	7 orang
Pendidikan setingkat SLTA	25 orang
Pendidikan setingkat SLTP	3 orang
Pendidikan setingkat SD	1 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>58 ORANG</b>

### C. Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman tahun 2018-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada kurun waktu 2 tahun mendatang (sisa waktu renstra 2018-2018), yaitu meliputi :

1. *Kawasan Kumuh Perkotaan dan Lingkungan Permukiman yang Layak*

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam, hal ini ditunjukkan dengan indikasi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, salah satunya Perkotaan Purwokerto yang merupakan perkotaan terbesar di Kabupaten Banyumas.

2. *Kebutuhan Masyarakat tentang Informasi Tata Ruang*

Saat ini kemajuan teknologi informasi begitu pesat dan menjadi kebutuhan hampir semua orang. Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh warga negara mengakses informasi dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Konsekuensinya, setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah diwajibkan untuk membuka diri pada publik dan memberikan pelayanan prima kepada mereka yang membutuhkan informasi.

Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyumas berlangsung relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas dibanyak sektor. Pertumbuhan ini ditandai dengan munculnya banyak bangunan baik berupa bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai wujud pemanfaatan ruang.

Berbagai aktivitas/kegiatan yang memanfaatkan ruang selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu penyediaan informasi tata secara *online*. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tata ruang. Bentuk pelayanan informasi tata ruang diantaranya adalah konsultasi pemanfaatan ruang, dan rekomendasi keterangan rencana darah.

3. *Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, sanitasi, air bersih) dan tuntutan penyediaan fasilitas umum*

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai *akses universal* air bersih dan sanitasi.

Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah terutama di daerah perkotaan yang semakin tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang ini sudah mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampa puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan perumahan padat penduduk seperti kawasan perumahan, yang kavling tanahnya kecil-kecil. Kondisi ini berpotensi merusak lingkungan hidup.

Sebagai kebutuhan dasar, air bersih dan sanitasi menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi indikator kemiskinan. Minimya anggaran pada sektor air bersih dan sanitasi apabila disandingkan dengan sektor lainnya misalnya infrastruktur jalan dan irigasi justru menjadi tantangan tersendiri bagi *stakeholder* dalam pembangunan, dan pengembangan layanan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

Demikian juga terhadap penyediaan fasilitas umum untuk infraststruktur permukiman, seperti drainase, saluran air limbah, trotoar pedestrian, penataan makam milik pemerintah juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian karena sangat berhubungan dengan *goals* pencapaian indikator luas permukiman yang tertata. Dalam 2 (dua) tahun kedepan pembiayaan untuk sektor air bersih, sanitasi, trotoar pedestrian dan penyediaan fasilitas umum (infrastruktur perumahan dan permukiman) adalah sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam milyar rupiah).



## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2018

Perencanaan Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018. Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Program dan Kegiatan tahun 2018.

Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2018 yang disusun setiap lima tahun.

PK dan IKU telah mengalami revisi, dengan Pendampingan langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sedangkan Indikator Revisi RENSTRA juga sudah direvisi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga ada beberapa Indikator RENSTRA yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas.

PK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1 Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,69
		2 Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	8,48
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	3 Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	96,00
		4 Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	2,80

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	885.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	624.500.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000
4	Program Pengembangan Perumahan	690.000.000
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7.350.000.000
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11.797.000.000
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	13.463.500.000
8	Program Penyediaan Fasilitas Umum	6.295.000.000
9	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	29.363.000.000
10	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.970.000.000
11	Program Pemanfaatan Ruang	739.000.000
12	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	341.000.000
	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>76.693.000.000</b>



## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pencapaian Kinerja Organisasi

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA/SASARAN STRATEGIS	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	75,69	75,81	100,16
		Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	8,48	9,09	107,19
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	96,00	98,51	102,61
		Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	2,80	2,28	118,57

Ada 2 (dua) Sasaran dalam IKU tahun 2018, yaitu :

#### Sasaran 1 :

#### **Meningkatnya Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar.**

Untuk mencapai Sasaran 1, ada 2 (dua) Indikator yang mendukungnya, yaitu ***Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar*** dan ***Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata***.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Pencapaian IKU ***“Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar”*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sampai akhir tahun 2018 adalah sebesar **75,81%**, ini artinya rumah sehat sesuai standar di Kabupaten Banyumas

ada sebanyak 397.333 rumah dari keseluruhan rumah yaitu 446.003 (*data BPS, dan Susenas 2018*).

Khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2018 telah ditangani sebanyak 4.604 unit rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Program BSPS Kementerian PUPR 1.073 rumah
- Program RTLH Provinsi Jawa Tengah 1.621 rumah
- Program RTLH APBD Kab Banyumas 1.394 rumah
- Baznas dan Sumber ADD Kab Banyumas 516 rumah

Jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 52.818 rumah, sampai dengan akhir tahun 2018 sudah ditangani sebanyak 4.604 rumah, sementara program dari CSR (Corporate Social Responsibility) masih perlu digali dan di dorong dalam upaya mendukung program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian indikator antara lain, anggaran untuk program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD masih minim dan terjadinya perubahan data dasar (PBDT/Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memberikan *support* anggaran yang memadai untuk program penanganan RTLH dan harus melakukan pemutakhiran mandiri berbasis data terpadu.

Pencapaian IKU "**Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata**" sampai akhir tahun 2018 adalah sebesar **9,09%**, ini artinya luas area permukiman tertata di Kabupaten Banyumas sudah mencapai *1.724 hektar* dari luas area permukiman keseluruhan yaitu sebesar *18.973,43 hektar*.

**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2018**  
**Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,69	75,81	100,15
2	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	8,48	9,09	107,00

**Keterangan :**

1. Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar Persentase Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 100,15 persen
2. Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata Persentase Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 107,00 persen

**Sasaran 2 :****Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman**

Untuk mencapai Sasaran 2, ada 2 (dua) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang*** dan ***Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang***.

Pencapaian IKU ***“Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang”*** sampai akhir tahun 2018 adalah sebesar **98,51%**, ini artinya jumlah advice planning yang sesuai tata ruang di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.506 *pemohon* dari jumlah keseluruhan permohonan yaitu 1.541

Sedangkan Pencapaian IKU ***“Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang”*** sampai akhir tahun 2018 adalah sebesar **2,28%**, ini artinya Jumlah pelanggaran tata ruang di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 35 *pelanggaran* dari jumlah keseluruhan permohonan yaitu 1.541

Keterangan Rencana Daerah (KRD)/*Advice Planning* adalah satu dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Banyumas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, *Advice Planning* adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.

*Advice Planning* berisi :

1. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. KDB maksimum yang diizinkan;
6. KLB maksimum yang diizinkan;
7. KDH minimum yang diwajibkan;
8. KTB maksimum yang diizinkan; dan
9. Jaringan utilitas kota.



**JUMLAH PERMOHONAN ADVICE PLANNING BERDASARKAN BULAN  
TAHUN 2016 - 2018**

NO	BULAN	2016	2017	2018
1	Januari	49	132	133
2	Februari	71	196	121
3	Maret	86	145	147
4	April	86	150	119
5	Mei	67	140	139
6	Juni	87	98	44
7	Juli	36	131	113
8	Agustus	72	170	146
9	September	62	153	128
10	Oktober	95	141	163
11	November	107	144	167
12	Desember	109	110	121
	<b>TOTAL</b>	<b>927</b>	<b>1710</b>	<b>1541</b>

**Keterangan :**

1. Advice Planning Desember 2018 sebanyak 121 Permohonan
2. Total Advice Planing dari Januari s/d Desember 2018 adalah 1.541 Permohonan

**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2018**  
**Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan**  
**Permukiman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	96,00	98,51	102,00
2	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	2,80	2,28	118,57

**Keterangan :**

1. Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang Persentase Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 102,00 persen
2. Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang Persentase Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 118,57 persen (Indikator ini Trennya Menurun, jadi semakin Kecil dari Target semakin Baik)

Grafik 1 :



## B. Realisasi Anggaran 2018

Realisasi anggaran dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang merupakan realisasi dari target Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bupati Banyumas yang disusun pada awal tahun 2018.

### 1. Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Pengukuran Kinerja tahun 2018)

No	Sasaran	Indikator	Sat	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1.1	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,69	75,81	100.15	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	690.000.000	350.926.230	50.86
								2	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	7.350.000.000	6.407.758.136	87.18
								3	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	11.797.000.000	11.503.643.894	97.51
								4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	13.263.500.000	12.036.405.426	90.75
								5	PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM	6.295.000.000	6.223.007.104	98.86
								6	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	29.363.000.000	28.597.883.606	97.39
		1.2	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	8,48	9,09	107.00	7	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	4.970.000.000	4.868.388.736	97.96
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	2.1	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	96,00	98,51	102.00	8	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	739.000.000	221.803.100	30.01
		2.2	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	2,80	2,28	122.00	9	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	341.000.000	312.407.320	91.62
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>									<b>74.808.500.000</b>	<b>70.522.223.552</b>	<b>94.27</b>	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi anggaran terbesar dari 3 (tiga) Program dengan anggaran dan realisasi terbesar pertama adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dengan anggaran 29,3 milyar rupiah terealisasi sebesar 28,5 milyar.

Output dari kegiatan adalah Jumlah volume Infrastruktur Perkotaan (jalan lingkungan dan talud) yang dibangun/dipelihara dengan baik seluas 588.558 meter persegi. Sedangkan Outcomenya adalah meningkatnya kualitas fisik jalan dan lingkungan di daerah perkotaan, untuk menunjang ekonomi kerakyatan.

Kedua *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah* dengan anggaran 13,4 milyar rupiah terealisasi sebesar 12,7 milyar rupiah. Output kegiatan ini adalah Jumlah sarpras Air Bersih dan sanitasi yang dibangun dan terpelihara dengan baik sebanyak 44 lokasi diseluruh Kab Banyumas.

Kemudian disusul *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong* dengan anggaran 11,7 milyar rupiah terealisasi sebesar 11,5 milyar rupiah. Output kegiatan ini adalah jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dibangun dengan baik sebanyak 67 lokasi meliputi :

1. Kec Purwokerto Barat (16 Lokasi)
2. Kec. Purwokerto Timur (11 Lokasi)
3. Kec. Purwokerto Selatan (17 Lokasi)
4. Kec. Purwokerto Utara (13 Lokasi)
5. Kec. Sumpiuh (2 Lokasi)
6. Kec. Wangon (1 Lokasi)
7. Kec. Kembaran (1 Lokasi)
8. Kec. Cilongok (1 Lokasi)
9. Kec. Karanglewas (3 Lokasi)
10. Kec. Sokaraja (1 Lokasi)
11. Kec. Ajibarang (1 lokasi)

Sedangkan Outcomenya adalah meningkatnya kualitas fisik saluran drainase untuk mengurangi genangan air hujan (di tepi jalan maupun di permukiman).

**2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1.1	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,69	75,81	100.15	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	690.000.000	350.926.230	50.86
								2	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	7.350.000.000	6.407.758.136	87.18
								3	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	11.797.000.000	11.503.643.894	97.51
								4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	13.263.500.000	12.036.405.426	90.75
								5	PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM	6.295.000.000	6.223.007.104	98.86
								6	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	29.363.000.000	28.597.883.606	97.39
		1.2	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	8,48	9,09	107.00	7	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	4.970.000.000	4.868.388.736	97.96
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>							<b>103.58</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>73.728.500.000</b>	<b>69.988.013.132</b>	<b>94.93</b>	
<b>TINGKAT EFISIENSI 8.65 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 109.11 %</b>												
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	2.1	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	96	98,51	102.00	8	PROGRAM PEMAFATAN RUANG	739.000.000	221.803.100	30.01
		2.2	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	2,8	2,28	118.57	9	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	341.000.000	312.407.320	91.62
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>							<b>110.29</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>534.210.420</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 62.54 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 226.43 %</b>												
									<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>74.808.500.000</b>	<b>70.522.223.552</b>	<b>94.27</b>



## BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 103.58 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 112.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan meskipun tidak signifikan namun prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif, efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan Tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 8,65% dan Tingkat Efektifitas Anggaran sebesar 109,11%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan Tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 62,54% dan Tingkat Efektifitas Anggaran sebesar 226,43%

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2018. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang.

Purwokerto, Februari 2019



KERALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Ir. JUNADI, MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 19661213 199303 1 005

**LAMPIRAN**  
**(PK DINPERKIM 2018)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143  
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Januari 2018

PIHAK KEDUA

BUPATI BANYUMAS



Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580421 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143  
Telp. (0281) 640359 Fax. 640359

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

JABATAN : KEPALA DINAS (ESELON IIB)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1 Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,69
		2 Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	8,48
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	3 Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	96,00
		4 Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	2,80

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494.500.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000
4	Program Pengembangan Perumahan	600.000.000
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6.925.000.000
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	10.579.500.000
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	13.131.000.000
8	Program Penyediaan Fasilitas Umum	6.045.000.000
9	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	22.305.000.000
10	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.970.000.000
11	Program Pemanfaatan Ruang	475.000.000
12	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	500.000.000
JUMLAH		66.985.000.000

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Purwokerto, Januari 2018

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT